



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERENCANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah secara efektif, efisien, dan terpadu serta guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu adanya perencanaan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan guna optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6350);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 385);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 23);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.



5. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan program Perangkat Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus.
7. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi kegiatan, sasaran, fokus, dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah Tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada APIP dalam melaksanakan Perencanaan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Daerah;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pengawasan oleh APIP.



BAB III
PERENCANAAN PENGAWASAN

Pasal 4

Perencanaan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi perencanaan terhadap:

- a. kegiatan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sasaran yakni Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, sekolah, Unit Kerja, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. fokus berupa penjaminan mutu (*quality assurance*), konsultasi (*consulting*), dan kegiatan pencegahan korupsi (*anti corruption activities*); dan
- d. jadwal pelaksanaan berupa penentuan tahapan pengawasan dilaksanakan dalam periode bulan Januari sampai dengan Desember 2021.

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun melalui koordinasi antara Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Penyusunan Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan skala prioritas dan risiko.

Pasal 6

APIP dalam melakukan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan :

- a. perencanaan kegiatan, sasaran, dan fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. jadwal pelaksanaan perencanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dengan uraian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

APIP dalam melakukan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 7 Januari 2021

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 NOMOR 3

h ~ 4/1

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERENCANAAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS

URAIAN KEGIATAN, SASARAN, DAN
FOKUS PERENCANAAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan terselenggaranya pemerintahan yang bersih (*clean government*), APIP dituntut untuk dapat melaksanakan pengawasan secara efektif. Selain itu APIP harus inovatif, merubah mindset ke arah kegiatan pemberian saran (*advisory activities*), menyusun Program Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR), dan memiliki kompetensi untuk melakukan audit kinerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat memiliki peran antara lain:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan/ ekonomis, efesiensi, efektifitas, dan persamaan (*equality*) dalam pencapaian tujuan instansi pemerintah;
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan implementasi manajemen risiko instansi pemerintah; dan
3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Untuk mewujudkan peningkatan kinerja pengelolaan pemerintahan di pemerintah Daerah dan Pemerintah desa, serta untuk mewujudkan peningkatan hasil guna dan daya guna pelaksanaan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa perlu dilakukan pengawasan.

II. TUJUAN

Inspektorat menyusun Perencanaan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2021 dengan tujuan sebagai berikut :

1. memberikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan pada tahun 2021;
2. meningkatkan akuntabilitas publik instansi Pemerintah Daerah;
3. menetapkan prioritas pengawasan yang bersifat strategis dan bermanfaat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
4. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat kepada APIP.

III. KEGIATAN PENGAWASAN

Perencanaan Kegiatan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2021, adalah sebagai berikut :

1. pelaksanaan pengawasan internal berbasis risiko;
2. pengusutan atas kebenaran laporan pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan konsultasi (*consulting*) terhadap pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dan Kepala Desa (*kas opname* desa dan *stock opname* barang persediaan perangkat daerah);
4. melakukan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) atas seluruh Perangkat Daerah;
5. melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah;
6. melakukan reviu atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus;
7. melakukan reviu atas Standar Harga;
8. melakukan reviu atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
9. melakukan reviu atas penyerapan anggaran, pengadaan barang/jasa dan dana desa;
10. melakukan reviu atas *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) Perangkat Daerah;
11. melakukan reviu atas Dana Alokasi Khusus (DAK);
12. melakukan reviu atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan (RKPD);
13. melakukan reviu Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Perubahan (KUA PPAS);
14. melakukan reviu atas Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah;
15. melakukan reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
16. melakukan reviu atas pengelolaan aset/Barang Milik Daerah (BMD);
17. melakukan reviu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
18. melakukan *Monitoring Centre of Prevention* (MCP) dengan koordinator unit koordinasi dan supervise Bidang Pencegahan KPK;
19. melakukan monitoring dan pemutahiran data tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal;
20. menyelenggarakan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (Saber Pungli);
21. menyelenggarakan Unit Pengendalian Gratifikasi dan penanganan *Whistle Blowing System* (WBS);
22. menyelenggarakan bimbingan teknis sesuai tema/isu strategis dan kebutuhan *audity*;

23. melakukan pendampingan terhadap pembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah;
24. melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
25. melakukan pendampingan dan evaluasi atas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Perangkat Daerah;
26. melakukan pendampingan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*;
27. melakukan evaluasi Perencanaan Pembangunan *Responsif Gender* (PPRG);
28. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
29. Melakukan evaluasi atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

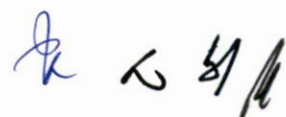
IV. SASARAN PENGAWASAN

Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2021 sasaran perencanaan meliputi program/kegiatan/sub kegiatan pada Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, sekolah, Unit Kerja, dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Sasaran Pengawasan dimaksud ditentukan lebih lanjut dalam Program Kerja Audit.

V. FOKUS PERENCANAAN PENGAWASAN

Fokus perencanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2021 meliputi:

1. Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) :
 - a. audit kinerja;
 - b. audit dengan tujuan tertentu;
 - c. rewiu; dan
 - d. evaluasi.
2. Konsultasi (*Consulting*) :
 - a. pendampingan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. pendampingan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - c. pendampingan Zona Integritas (ZI); dan
 - d. bimbingan teknis.
3. Kegiatan Anti Korupsi (*Anti Corruption Activities*):
 - a. *Monitoring Centre for Prevention (MCP)* Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi dengan Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 - b. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
 - c. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
 - d. pengaduan masyarakat;



- e. pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); dan
 - f. pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
4. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, Inspektorat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengawasan terpadu (*joint audit*) dengan Badan Pemeriksa Keuangan Pusat atau bersama instansi terkait;
 - b. melayani dan membuka klinik konsultasi;
 - c. menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Inspektorat untuk memaparkan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat;
 - d. menyelenggarakan pematkhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - e. menyelenggarakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) guna meningkatkan ilmu dan wawasan dibidang pengawasan;
 - f. monitoring Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); dan
 - g. melakukan pendampingan Perangkat daerah, Pemerintah Desa, sekolah, Unit Kerja, dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan keyakinan pelaksanaan tugas dan fungsinya atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan.

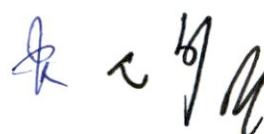
VI. PENUTUP

Demikian Perencanaan Pengawasan Tahun 2021 untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pengawasan dan fungsi Inspektorat sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PERENCANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021

JADWAL PELAKSANAAN PERENCANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021

| No | Area Pengawasan | Jenis Pengawasan | Tujuan/Sasaran | Ruang Lingkup | Jadwal | | Anggota Tim | | | | HP | Anggaran | Jumlah Laporan | Sarana dan Prasarana | Tingkat Risiko | Keterangan |
|-----|---|--------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-------------|----|----|----|-----|-------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------------|
| | | | | | RMP | RPL | PM | PT | KT | AT | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | (7) | | | | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| 1 | Pengelolaan aset daerah | Reviu | Menilai kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah | pengelolaan aset daerah Th 2020 | Mg-I Des 2020 | Mg-III Jan 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.600.000 | 1 LHR | Laptop, ATK | Tinggi | Rekomendasi MCP |
| 2 | Program Peningkatan Pendapatan Daerah | Audit Kinerja | Menilai 3E atas Program Peningkatan Pendapatan Daerah | BPPKAD | Mg-I Feb 2021 | Mg-IV Feb 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10.800.000 | 1 LHA | Laptop, ATK | Tinggi | Pemintaan BPKP |
| 3 | Aduan Masyarakat/ Permintaan Stakeholders | Audit Tujuan Tertentu | Investigasi/ konfirmasi atas penyimpangan terhadap Peraturan | Tindak Lanjut Dumas/ Permintaan Stakeholders | Mg-I Jan 2021 | Mg-IV Des 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 76 | 91.200.000 | 9 LHA | Laptop, ATK | Tinggi | |
| 4 | Problem solving | Konsultasi | memberikan solusi atas permasalahan/ risiko | OPD, UPT, Desa | Mg-I Jan 2021 | Mg-IV Des 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 12 Lap | Laptop, ATK | Tinggi | |
| 5 | Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan | Reporting | Melaporkan hasil pengawasan kepada MOS | ILHP 2020 semester II | Mg-II Jan 2021 | Mg-IV Jan 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 1 LHA | Laptop, ATK | Rendah | Renbinwas 2021 Kemendagri |
| 6 | SAKIP | Bimtek | Penilaian mandiri SAKIP OPD | Seluruh OPD | Mg-III Jan 2021 | Mg-III Jan 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 1 LHR | Laptop, ATK | Tinggi | Pemintaan Kemen PANRB |
| 7 | Dana Alokasi Khusus (DAK) | Reviu | Menilai kesesuaian pelaksanaan DAK | DAK TW IV 2020 | Mg-III Jan 2021 | Mg-III Jan 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7.200.000 | 5 LHR | Laptop, ATK | Tinggi | Mandatory Kemenkeu |
| 8 | Harga Perkiraan Sendiri (HPS) | Reviu | Menilai kewajaran HPS | PBJ > 500 jt | Mg-IV Jan 2021 | Mg-IV Okt 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 270 | 40.500.000 | 50 LHR | | | |
| 9 | Reformasi Birokrasi | Monev | PMRB TW I | Seluruh OPD | Mg-IV Mrt 2021 | Mg-IV Mrt 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 600.000 | 1 LHR | Laptop, ATK | Tinggi | Pemintaan Sekda |
| 10 | LHKASN | Verifikasi | Memverifikasi LHKASN | ASN Gol IV dan Eselon III & IV | Mg-I Mrt 2021 | Mg-V Mrt 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 1 Lap | Laptop, ATK | Tinggi | Mandatory Kemen PANRB |
| 11 | Saber Pungli | Monitoring, Sosialisasi & Penindakan | Memberantas Pungli | OPD, UPT, Desa | Mg-IV Jan 2021 | Mg-IV Des 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 452.400.000 | 12 Lap | Laptop, ATK | Tinggi | Renbinwas 2021 Kemendagri |
| 12 | WBS & benturan kepentingan | Monitoring & Sosialisasi | Investigasi/ konfirmasi atas penyimpangan terhadap Peraturan | OPD, UPT, Desa | Mg-IV Jan 2021 | Mg-IV Des 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 12 Lap | Laptop, ATK | Tinggi | Renbinwas 2021 Kemendagri |
| 13 | Pengendalian Gratifikasi | Monitoring & Sosialisasi | sosialisasi dan menindak lanjuti laporan gratifikasi | OPD, UPT, Desa | Mg-IV Jan 2021 | Mg-IV Des 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 12 Lap | Laptop, ATK | Tinggi | Renbinwas 2021 Kemendagri |

Handwritten signature/initials

| No | Area Pengawasan | Jenis Pengawasan | Tujuan/Sasaran | Ruang Lingkup | Jadwal | | Anggota Tim | | | | HP | Anggaran | Jumlah Laporan | Sarana dan Prasarana | Tingkat Risiko | Keterangan |
|-----|---|---------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|----|----|----|-----|------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------------|
| | | | | | RMP | RPL | PM | PT | KT | AT | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | (7) | | | | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| 14 | Analisis Standar Biaya | Reviu | Menilai kesesuaian poses penyusunan ASB | ASB 2022 | Mg-I Feb 2021 | Mg-III Feb 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.600.000 | 1 LHR | Laptop, ATK | Tinggi | Rekomendasi MCP |
| 15 | Harga Satuan Pokok Kegiatan | Reviu | Menilai kesesuaian poses penyusunan HSPK | HSPK 2022 | Mg-I Feb 2021 | Mg-III Feb 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.600.000 | 1 LHR | Laptop, ATK | Tinggi | Rekomendasi MCP |
| 16 | Standar Satuan Harga | Reviu | Menilai kewajaran harga dan kesesuaian poses penyusunan SSH | SSH 2022 | Mg-I Feb 2021 | Mg-III Feb 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.600.000 | 1 LHR | Laptop, ATK | Tinggi | Rekomendasi MCP |
| 17 | Standar Belanja Umum | Reviu | Menilai kewajaran harga dan kesesuaian poses penyusunan SBU | SBU 2022 | Mg-I Feb 2021 | Mg-III Feb 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.600.000 | 1 LHR | Laptop, ATK | Tinggi | Rekomendasi MCP |
| 18 | Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Reviu | Memvalidasi data kinerja IKK | LPPD 2020 | Mg-I Feb 2021 | Mg-III Feb 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10.800.000 | 1 LHE | Laptop, ATK | Tinggi | Renbinwas 2021 Kemendagri |
| 19 | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Reviu | Menilai kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah | BPPKAD & OPD | Mg-I Feb 2021 | Mg-IV Mrt 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 21.600.000 | 10 LHR | Laptop, ATK | Tinggi | Pemintaan KDH |
| 20 | Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Evaluasi | Menilai implementasi SAKIP | 34 Perangkat Daerah | Mg-I Feb 2021 | Mg-III Apr 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 25.500.000 | 34 LHE | Laptop, ATK | Tinggi | Mandatory Kemen PANRB |
| 21 | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Monev | PMPRB TW II | Semua OPD | Mg-III Jun 2021 | Mg-III Jun 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.600.000 | 1 LHE | Laptop, ATK | Tinggi | Renbinwas 2021 Kemendagri |
| 22 | Pengadaan Barang Jasa | ATT | Memberikan keyakinan yang memadai atas pelaksanaan PBJ Fisik | Proyek fisik | Mg I Okt 2021 | Mg 1 Des 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | | 6 LHA | Laptop, ATK | Tinggi | Pemintaan BPKP |
| 23 | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Monev | PMPRB TW III | Semua OPD | Mg-IV Sep 2021 | Mg-IV Sep 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3.000.000 | 1 LHE | Laptop, ATK | Tinggi | Renbinwas 2021 Kemendagri |
| 24 | Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM | Pemantauan & Pendampingan/ Konsulting | Mendampingi dan memantau implementasi Pembangunan ZI | UPT Puskesmas Jekulo | Mg-IV Feb 2021 | Mg-IV Feb 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3.000.000 | 1 LHE | Laptop, ATK | Tinggi | Renbinwas 2021 Kemendagri |
| 25 | Pengadaan Barang Jasa | Probit Audit | memastikan bahwa proses PBJ telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip integritas, kebenaran, dan kejujuran | Proyek fisik | Mg-I Mrt 2021 | Mg-III Mei 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10.800.000 | 10 LHA | Laptop, ATK | Tinggi | Rekomendasi MCP |
| 26 | Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Pertanian/ Perkebunan | Audit Kinerja | Menilai 3E atas Program Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan | Dinas Pertanian & Pangan | Mg-I Mrt 2021 | Mg-IV Mrt 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14.400.000 | 1 LHA | Laptop, ATK | Tinggi | Pemintaan BPKP |
| 27 | Program Program perencanaan prasarana wilayah, Ekonomi dan sumber daya alam | Audit Kinerja | Menilai 3E atas Program peningkatan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah | Bappeda | Mg-I Mrt 2021 | Mg-IV Mrt 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14.400.000 | 1 LHA | Laptop, ATK | Tinggi | Pemintaan BPKP |
| 28 | Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat TW I | Monitoring | Memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan | Seluruh OPD | Mg-I Mrt 2021 | Mg-V Mrt 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14.400.000 | 4 Lap | Laptop, ATK | Tinggi | Renbinwas 2021 Kemendagri |
| 29 | Koordinasi Pengawasan | Pendampingan | Memfasilitasi BPK audit keuangan LKPD | Audit Keuangan atas LKPD 2020 | Mg-I Apr 2021 | Mg-IV Apr 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12.000.000 | 1 Lap | Laptop, ATK | Tinggi | |

| No | Area Pengawasan | Jenis Pengawasan | Tujuan/Sasaran | Ruang Lingkup | Jadwal | | Anggota Tim | | | | HP | Anggaran | Jumlah Laporan | Sarana dan Prasarana | Tingkat Risiko | Keterangan |
|-----|--|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|----|----|----|-----|------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------------|
| | | | | | RMP | RPL | PM | PT | KT | AT | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | (7) | | | | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| 30 | Pengelolaan Dana Desa | Audit Tujuan Tertentu | Menilai 3E atas Pengelolaan Dana Desa | 18 Desa | Mg-I Agt 2021 | Mg-III Sep 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | 64.800.000 | 18 LHA | Laptop, ATK | Tinggi | |
| 31 | Monitoring Centre of Prevention TW I | Monitoring | Memantau tindak lanjut rekomendasi Korsupgah KPK | Rekomendasi Korsupgah | Mg-IV Mrt 2021 | Mg-IV Mrt 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.600.000 | 1 Lap | Laptop, ATK | Tinggi | |
| 32 | Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) | Monitoring | Memantau realisasi LHKPN | Eselon II, DPRD, Bupati, Auditor | Mg-IV Mrt 2021 | Mg-IV Mrt 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 1 Lap | Laptop, ATK | Tinggi | Mandatory Kemen PANRB |
| 33 | Reformasi Birokrasi | Monev | PMPRB TW IV | Semua OPD | Mg-IV Des 2021 | Mg-IV Des 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 600.000 | 1 Lap | Laptop, ATK | Tinggi | |
| 34 | Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM | Pemantauan & Pendampingan/ Konsulting | Mendampingi dan memantau implementasi Pembangunan ZI | DPMPSTSP | Mg-V Mrt 2021 | Mg-V Mrt 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.600.000 | 1 LHE | Laptop, ATK | Tinggi | Renbinwas 2021 Kemendagri |
| 35 | Penerapan manajemen Risiko | Pemantauan & Pendampingan/ Konsulting | Mendampingi dan memantau implementasi Manajemen Risiko | Bappeda | Mg-V Mrt 2021 | Mg-V Mrt 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.600.000 | 1 LHE | Laptop, ATK | Tinggi | Renbinwas 2021 Kemendagri |
| 36 | Program peningkatan dan pengelolaan pasar | Audit Tujuan Tertentu atas Pendapatan | Menilai realisasi Pendapatan Daerah | Dinas Perdagangan | Mg-I Apr 2021 | Mg-III Apr 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10.800.000 | 1 LHA | Laptop, ATK | Tinggi | Rekomendasi MCP |
| 37 | Dana Alokasi Khusus (DAK) | Reviu | Menilai kesesuaian pelaksanaan DAK TW I 2021 | DAK TW I 2021 | Mg-I Apr 2021 | Mg-III Apr 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10.800.000 | 5 LHR | Laptop, ATK | Tinggi | Mandatory Kemenkeu |
| 38 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) | Reviu | Menilai keselarasan RKPD dengan RPJMD dan Renja serta terpadu dengan Manajemen Risiko dan Pengarus Utama Gender | Bappeda & Semua OPD | Mg-I Apr 2021 | Mg-IV Mei 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 28.800.000 | 1 LHR | Laptop, ATK | Tinggi | Renbinwas 2021 Kemendagri |
| 39 | Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM | Pemantauan & Pendampingan/ Konsulting | Mendampingi dan memantau implementasi Pembangunan ZI | BPPKAD | Mg-IV Apr 2021 | Mg-IV Apr 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.600.000 | 1 LHE | Laptop, ATK | Tinggi | Renbinwas 2021 Kemendagri |
| 40 | Program pelayanan penanaman modal | Audit Ketaatan Perizinan | menilai ketaatan terhadap prosedur, tata cara serta peraturan perundang-undangan | PTSP | Mg-I Jun 2021 | Mg-III Jun 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7.200.000 | 1 LHA | Laptop, ATK | Tinggi | Rekomendasi MCP |
| 41 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD Perubahan) | Reviu | Menilai keselarasan RKPD Perubahan dengan Renja Perubahan | Bappeda & Semua OPD | Mg-I Jun 2021 | Mg-III Jun 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7.200.000 | 1 LHR | Laptop, ATK | Tinggi | Renbinwas 2021 Kemendagri |
| 42 | Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) | Reviu | Menilai keselarasan KUA PPAS dengan RKPD | Bappeda & Semua OPD | Mg-I Jun 2021 | Mg-III Jun 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7.200.000 | 1 LHR | Laptop, ATK | Tinggi | Renbinwas 2021 Kemendagri |
| 43 | Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat TW II | Monitoring | Memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan | Seluruh OPD | Mg-I Jun 2021 | Mg-IV Jun 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14.400.000 | 4 Lap | Laptop, ATK | Tinggi | |
| 44 | Vaksinasi Covid-19 | Audit Tujuan Tertentu | Memastikan pelaksanaan vaksinasi covid-19 tepat sasaran | Dinas Kesehatan | Mg-I Jun 2021 | Mg-IV Des 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 21.600.000 | 3 LHA | Laptop, ATK | Tinggi | Instruksi Mendagri |
| 45 | Monitoring Centre of Prevention TW II | Monitoring | Memantau tindak lanjut rekomendasi Korsupgah KPK | Rekomendasi Korsupgah | Mg-III Jun 2021 | Mg-III Jun 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.600.000 | 1 Lap | Laptop, ATK | Tinggi | |

Handwritten signature/initials

| No | Area Pengawasan | Jenis Pengawasan | Tujuan/Sasaran | Ruang Lingkup | Jadwal | | Anggota Tim | | | | HP | Anggaran | Jumlah Laporan | Sarana dan Prasarana | Tingkat Risiko | Keterangan |
|-----|--|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|----|----|----|-----|------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------------|
| | | | | | RMP | RPL | PM | PT | KT | AT | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | (7) | | | | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| 46 | Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM | Pemantauan & Pendampingan/ Konsulting | Mendampingi dan mengevaluasi implementasi Pembangunan ZI | Disdikpora | Mg-IV Jun 2021 | Mg-IV Jun 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.600.000 | 1 LHE | Laptop, ATK | Tinggi | Renbinwas 2021 Kemendagri |
| 47 | Penerapan manajemen Risiko | Pemantauan & Pendampingan/ Konsulting | Mendampingi dan mengevaluasi implementasi SPIP | BPPKAD | Mg-IV Jun 2021 | Mg-IV Jun 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.600.000 | 1 LHE | Laptop, ATK | Tinggi | Renbinwas 2021 Kemendagri |
| 48 | Dana Alokasi Khusus (DAK) | Reviu | Menilai kesesuaian pelaksanaan DAK TW II 2021 | OPD | Mg-I Jul 2021 | Mg-III Jul 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7.200.000 | 5 LHR | Laptop, ATK | Tinggi | Mandatory Kemenkeu |
| 49 | Penanganan Pandemi Covid 19 | Reviu | Memverifikasi data Nakes yang mendapat insentif | Insentif Nakes | Mg-I Jul 2021 | Mg-III Jul 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7.200.000 | 1 LHR | Laptop, ATK | Tinggi | |
| 50 | Pelayanan Publik | Evaluasi | Menilai kualitas pelayanan publik | Dinas Perhubungan | Mg-I Mei 2021 | Mg-II Mei 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7.200.000 | 1 LHE | Laptop, ATK | Tinggi | Renbinwas 2021 Kemendagri |
| 51 | Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (Perubahan KUA PPAS) | Reviu | Menilai keselarasan Perubahan KUA PPAS dengan RKPD Perubahan | Bappeda & Semua OPD | Mg-I Jul 2021 | Mg-II Jul 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7.200.000 | 1 LHR | Laptop, ATK | Tinggi | Renbinwas 2021 Kemendagri |
| 52 | Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM | Pemantauan & Pendampingan/ Konsulting | Mendampingi dan memantau implementasi Pembangunan ZI | RSD dr Loekmonohadi | Mg-III Jul 2021 | Mg-III Jul 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.600.000 | 1 LHE | Laptop, ATK | Tinggi | Renbinwas 2021 Kemendagri |
| 53 | Program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan | Evaluasi | Menilai kesesuaian output dengan dokumen GBS | Dinsos P3AP2KB | Mg-III Jul 2021 | Mg-III Jul 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.600.000 | 1 LHE | Laptop, ATK | Tinggi | Mandatory Kemen PPA |
| 54 | Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan | Monitoring | Melaporkan hasil pengawasan kepada MOS | ILHP 2021 semester I | Mg-III Jul 2021 | Mg-III Jul 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 1 ILHA | Laptop, ATK | Rendah | Renbinwas 2021 Kemendagri |
| 55 | Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM | Pemantauan & Pendampingan/ Konsulting | Mendampingi dan mengevaluasi implementasi Pembangunan ZI | Dinas Perdagangan | Mg-IV Jul 2021 | Mg-IV Jul 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.600.000 | 1 LHE | Laptop, ATK | Tinggi | Renbinwas 2021 Kemendagri |
| 56 | Penerapan manajemen Risiko | Pemantauan & Pendampingan/ Konsulting | Mendampingi dan mengevaluasi implementasi SPIP | BKPP | Mg-IV Jul 2021 | Mg-IV Jul 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.600.000 | 1 LHE | Laptop, ATK | Tinggi | Renbinwas 2021 Kemendagri |
| 57 | Program pengembangan, pendidikan dan pelatihan aparatur | Audit Kepegawaian | Menilai kesesuaian pelaksanaan Tusi dengan kebijakan peraturan perundang undangan | BKPP | Mg-I Agt 2021 | Mg-III Agt 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10.800.000 | 1 LHA | Laptop, ATK | Tinggi | Rekomendasi MCP |
| 58 | Program pengelolaan aset daerah | Reviu | memastikan keberadaan aset | Aset Tahun 2021 | Mg-I Agt 2021 | Mg-III Agt 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10.800.000 | 1 LHR | Laptop, ATK | Tinggi | Rekomendasi MCP |
| 59 | Rencana Kerja Anggaran (RKA) | Reviu | Menilai 3E rincian belanja dengan output | 12 OPD Strategis | Mg-I Agt 2021 | Mg-IV Agt 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14.400.000 | 10 LHR | Laptop, ATK | Tinggi | Mandatory Kemenkeu |
| 60 | Kapabilitas APIP | Monev | Menilai pemenuhan KPA | Inspektorat | Mg-IV Agt 2021 | Mg-IV Agt 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 1 LHE | Laptop, ATK | Tinggi | Renbinwas 2021 Kemendagri |
| 61 | Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM | Pemantauan & Pendampingan/ Konsulting | Mendampingi dan mengevaluasi implementasi Pembangunan ZI | Dinas Dukcapil | Mg-IV Agt 2021 | Mg-IV Agt 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.600.000 | 1 LHE | Laptop, ATK | Tinggi | Renbinwas 2021 Kemendagri |

Handwritten signature/initials

| No | Area Pengawasan | Jenis Pengawasan | Tujuan/Sasaran | Ruang Lingkup | Jadwal | | Anggota Tim | | | | HP | Anggaran | Jumlah Laporan | Sarana dan Prasarana | Tingkat Risiko | Keterangan |
|-----|--|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|----|----|----|-----|------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------------|
| | | | | | RMP | RPL | PM | PT | KT | AT | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | (7) | | | | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| 62 | Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) | Reviu | Menilai 3 E rincian belanja dengan output | 12 OPD Strategis | Mg-I Sep 2021 | Mg-IV Sep 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14.400.000 | 10 LHR | Laptop, ATK | Tinggi | Mandatory Kemenkeu |
| 63 | Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat TW III | Monitoring | Memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan | Seluruh OPD | Mg-I Spt 2021 | Mg-IV Spt 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14.400.000 | 1 Lap | Laptop, ATK | Tinggi | Renbinwas 2021 Kemendagri |
| 64 | Pemerintah Desa | Audit Tujuan Tertentu | Memberikan keyakinan yang memadai atas pengelolaan keuangan Pemerintah Desa | 9 Desa | Mg-I Sep 2021 | Mg-III Des 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 54 | 32.400.000 | 9 LHA | Laptop, ATK | Tinggi | Renbinwas 2021 Kemendagri |
| 65 | Monitoring Centre of Prevention TW III | Monitoring | Memantau tindak lanjut rekomendasi Korsupgah KPK | Rekomendasi Korsupgah | Mg-IV Spt 2021 | Mg-IV Spt 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.600.000 | 1 Lap | Laptop, ATK | Tinggi | |
| 66 | Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM | Pemantauan & Pendampingan/ Konsulting | Mendampingi dan memantau implementasi Pembangunan ZI | Bag PBJ | Mg-V Spt 2021 | Mg-V Spt 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.600.000 | 1 LHE | Laptop, ATK | Tinggi | Renbinwas 2021 Kemendagri |
| 67 | Penerapan manajemen Risiko | Pemantauan & Pendampingan/ Konsulting | Mendampingi dan memantau implementasi Manajemen Risiko | Dinas Budpar | Mg-V Spt 2021 | Mg-V Spt 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.600.000 | 1 LHE | Laptop, ATK | Tinggi | Renbinwas 2021 Kemendagri |
| 68 | Dana Alokasi Khusus (DAK) | Reviu | Menilai kesesuaian pelaksanaan DAK TW III 2021 | OPD | Mg-I Okt 2021 | Mg-III Okt 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10.800.000 | 5 LHR | Laptop, ATK | Tinggi | Mandatory Kemenkeu |
| 69 | Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota | Audit Ketaatan | menilai ketaatan terhadap prosedur, tata cara serta peraturan perundang-undangan | Barang Milik Daerah | Mg-I Okt 2021 | Mg-III Okt 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7.200.000 | 1 LHA | Laptop, ATK | Tinggi | Rekomendasi MCP |
| 70 | UKPBJ | Audit Ketaatan | menilai ketaatan terhadap prosedur, tata cara serta peraturan perundang-undangan | IT PBJ | Mg-I Nop 2021 | Mg-III Nop 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7.200.000 | 1 LHA | Laptop, ATK | Tinggi | Rekomendasi MCP |
| 71 | Penerapan manajemen Risiko | Pemantauan & Pendampingan/ Konsulting | Mendampingi dan mengevaluasi implementasi SPIP | Inspektorat | Mg-IV Okt 2021 | Mg-IV Okt 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.600.000 | 1 LHE | Laptop, ATK | Tinggi | Renbinwas 2021 Kemendagri |
| 72 | Penerapan manajemen Risiko | Pemantauan & Pendampingan/ Konsulting | Mendampingi dan memantau implementasi Manajemen Risiko | Dinas PMD | Mg-IV Okt 2021 | Mg-IV Okt 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.600.000 | 1 LHE | Laptop, ATK | Tinggi | Renbinwas 2021 Kemendagri |
| 73 | Penyusunan Kebijakan Teknis di bidang pengawasan | Forum Group Discussion | Menyusun Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemda Kudus Tahun 2022 | Inspektorat | Mg-I Jun 2021 | Mg-I Jun 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.600.000 | 1 Lap | Laptop, ATK | | Renbinwas 2021 Kemendagri |
| 74 | Penerapan manajemen Risiko | Pemantauan & Pendampingan/ Konsulting | Mendampingi dan memantau implementasi Manajemen Risiko | Dinas Dikpora | Mg-II Nop 2021 | Mg-II Nop 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.600.000 | 1 LHE | Laptop, ATK | Tinggi | Renbinwas 2021 Kemendagri |
| 75 | Penerapan manajemen Risiko | Pemantauan & Pendampingan/ Konsulting | Mendampingi dan memantau implementasi Manajemen Risiko | Dinas Kesehatan | Mg-III Nop 2021 | Mg-III Nop 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.600.000 | 1 LHE | Laptop, ATK | Tinggi | Renbinwas 2021 Kemendagri |

| No | Area Pengawasan | Jenis Pengawasan | Tujuan/Sasaran | Ruang Lingkup | Jadwal | | Anggota Tim | | | | HP | Anggaran | Jumlah Laporan | Sarana dan Prasarana | Tingkat Risiko | Keterangan |
|---------------|---|----------------------------|--|-----------------------|-----------------|----------------|-------------|----|----|----|-----|---------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------------|
| | | | | | RMP | RPL | PM | PT | KT | AT | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | (7) | | | | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| 76 | Peningkatan Kapabilitas APIP | Pengembangan Profesi (PKS) | Meningkatkan Kompetensi SDM APIP | Inspektorat | Mg IV Jan 2021 | Mg IV Des 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.600.000 | 12 Lap | Laptop, ATK | Tinggi | |
| 77 | Larwasda | | Menyampaikan hasil pengawasan 2021 dan Rencana pengawasan 2022 | OPD | Mg-IV Nop 2021 | Mg-IV Nop 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 20.000.000 | 1 Lap | Laptop, ATK | Tinggi | Renbinwas 2021 Kemendagri |
| 78 | Telaah Sejawat (Peer Review) Internal | Reviu | Menilai kepatuhan terhadap Standar Audit | Irbn I, II, III | Mg-I Des 2021 | Mg-II Des 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | - | 3 Lap | Laptop, ATK | Tinggi | Renbinwas 2021 Kemendagri |
| 79 | Monitoring Centre of Prevention TW IV | Monitoring | Memantau tindak lanjut rekomendasi Korsuppah KPK | Rekomendasi Korsuppah | Mg-II Des 2021 | Mg-II Des 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.600.000 | 1 Lap | Laptop, ATK | Tinggi | |
| 80 | Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat TW IV | Monitoring | Memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan | Seluruh OPD | Mg-III Des 2021 | Mg-IV Des 2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14.400.000 | 1 Lap | Laptop, ATK | Tinggi | Renbinwas 2021 Kemendagri |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | 982 | 1.192.400.000 | | | | |

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan
- (2) Diisi dengan nama Area Pengawasan
- (3) Diisi dengan jenis pengawasan yang akan dilakukan
- (4) Diisi dengan tujuan/sasaran atas jenis pengawasan yang akan dilakukan
- (5) Diisi dengan ruang lingkup pengawasan
- (6) Diisi dengan jadwal rencana akan dilakukan pengawasan (Rencana Mulai Penugasan dan Rencana Penerbitan Laporan)
- (7) Diisi dengan anggaran waktu pelaksanaan pengawasan untuk setiap jenjang jabatan
- (8) Diisi dengan anggaran dana pelaksanaan pengawasan
- (9) Diisi dengan jumlah rencana output laporan atas hasil pengawasan
- (10) Diisi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengawasan
- (11) Diisi dengan tingkat risiko area pengawasan
- (12) Diisi dengan keterangan lain bila dibutuhkan

Pt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,


HARTOPO

